

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

NAWACITA sebagai agenda prioritas Kabinet Kerja Tahun 2014 – 2019 mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, agar pemerintah Indonesia dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045 dengan skenario sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skenario Mewujudkan Lumbung Pangan Dunia 2045

Sumber: Kementerian Pertanian 2016

Kedaulatan pangan merupakan kemampuan suatu negara dalam hal: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Renstra Kementan 2015-2019).

Demi mewujudkan tujuan tersebut, pada tahun 2015 – 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan target pencapaian produksi 11 komoditas strategis nasional, meliputi swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai. Sejak akhir tahun 2014 Kementerian Pertanian mencanangkan Program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) untuk percepatan pencapaian produksi padi, jagung dan kedelai dengan dukungan APBN yang dilanjutkan pada tahun 2015 – 2017 termasuk komoditas strategis nasional lainnya, meliputi bawang merah, cabai, sapi/kerbau, tebu, kakao, kopi, kelapa sawit dan karet.

Selama tahun 2015 – 2019 sektor pertanian masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain jumlah penduduk yang sudah mencapai 259 juta jiwa, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, terbatasnya infrastruktur (jaringan irigasi, jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan), kurang tersedianya benih/ bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang tidak terkendali, ketergantungan konsumsi beras, kompetisi pemanfaatan air dan status kepemilikan lahan. Selain sejumlah kendala tersebut, pembangunan pertanian ke depan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); otonomi daerah; perubahan pola konsumsi; dan dinamika pasar pangan.

Selanjutnya, target pembangunan sektor pertanian tahun 2018 yaitu produksi komoditas strategis nasional tanaman pangan meliputi padi sebesar 87.987.100 ton, jagung 33.080.786 ton dan kedelai 2.900.000 ton dengan peningkatan produksi padi 2,82%, jagung 8,30% dan kedelai 141,67% dari target tahun 2017. Target produksi komoditas strategis nasional tanaman hortikultura tahun 2018 meliputi cabai 1.956.422 ton, bawang merah 1.293.846 ton, dan bawang putih 79.000 ton.

Target produksi komoditas strategis nasional tanaman perkebunan tahun 2018 meliputi tebu 2,95 juta ton gula kristal putih, kelapa sawit 34,52 juta ton CPO, karet 3,68 juta ton karet kering, kopi 0,76 juta ton biji berasan, kakao 0,92

juta ton biji kering, kelapa dalam 3,45 juta ton kopra (Renstra Kementan 2015-2019).

Target produksi daging tahun 2018 sebesar 1.076.170 ton dengan peningkatan produksi 6,87% dari target tahun 2017. Untuk pencapaian produksi daging tersebut, diupayakan melalui Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB). UPSUS SIWAB tersebut mencakup dua program utama yaitu: (1) peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan (2) Intensifikasi Kawin Alam (INKA), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/ PK.210/10/2016, tentang UPSUS Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Renstra Kementan 2015-2019).

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dukungan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap tingkatan wilayah pemerintahan yang terintegrasi dengan pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian tersebut meliputi aspek-aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian diarahkan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengelolaan usaha berdasarkan prinsip-prinsip agribisnis (Programa Penyuluh Pertanian Nasional, 2018).

Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, mengetaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan, meningkatkan pendapatan, serta menjaga kelestarian lingkungan (BPP Nanggulan, 2018).

Bahwa untuk meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga

pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), maka penyuluhan pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani.

Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Nanggulan, tugas dan fungsi serta peranannya ditengah tengah masyarakat khususnya petani seyogyanya dapat lebih dipahami dengan baik, sehingga masyarakat tani dapat lebih merasakan manfaat yang diambil dari keberadaan serta peranannya terhadap petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani yang dilakukan.

Wilayah Kecamatan Nanggulan termasuk wilayah kecamatan endemis serangan penggerek batang (sundep), tikus, sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan pengendalian secara preventif, pencegahan secara preventif dengan berbagai upaya-upaya menggunakan produk yang ramah lingkungan sehingga tercapai pertanian yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai pertanian yang berkelanjutan diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian, kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan pada setiap tingkatan mulai penyuluhan pada tingkat keluarga, penyuluhan tingkat kelompok dan tingkatan Desa sampai dengan penyuluhan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Terutama upaya pengembangan kelompok tani di tingkat Kecamatan Nanggulan agar tercapainya kemajuan pembangunan pertanian dan pertanian yang berkelanjutan (BPP Nanggulan, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyuluh pertanian dalam pengembangan Kelompok Tani di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo ?
2. Apa kendala penyuluh pertanian di lapangan dalam pengembangan Kelompok Tani di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran penyuluh pertanian dalam pengembangan Kelompok Tani di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam pengembangan Kelompok Tani di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi akhir Program Sarjana di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian INSTIPER Yogyakarta.
2. Bagi Penyuluh yaitu agar dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat peranan Penyuluh Pertanian dalam pengembangan Kelompok Tani.
3. Bagi Pemerintah yaitu untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagai dasar pembuatan regulasi agar dapat meningkatkan peranan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.